

SKRIPSI

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN ASAL USUL PERKAWINAN (STUDI KASUS TAHUN 2012-2014 DI KOTA PALU)



OLEH

NILA ALFANI

B111 11 283

BAGIAN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASAMUDDIN

MAKASSAR

2015

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN ASAL USUL PERKAWINAN (STUDI KASUS TAHUN 2012-2014 DI KOTA PALU)



OLEH

NILA ALFANI

B111 11 283

BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASAMUDDIN
MAKASSAR
2015

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN ASAL USUL PERKAWINAN (STUDI KASUS 2012-2014 DI KOTA PALU)

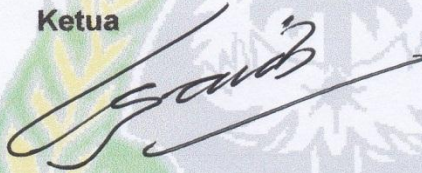
Disusun dan diajukan oleh:

**NILA ALFANI
B111 11 283**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015
dan Dinyatakan Diterima

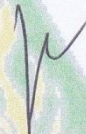
Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si
NIP. 19620711 198703 1 001

Sekretaris



Achmad, S.H., M.H.
NIP. 19680104 199303 1 002

a. n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIP. 19610607 198601 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari:

Nama : Nila Alfani

No. Pokok : B 111 11 283

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : **Tinjauan Kriminologi terhadap Kejahatan Asal Usul
Perkawinan di Kota Palu**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi pada
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, 21 Januari 2015

PEMBIMBING I



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si.

NIP. 19620711 198703 1 001

PEMBIMBING II



Achmad, S.H., M.H.

NIP. 19680104 199303 1 002

PERSETUJUAN MENEMPUPH UJIAN SKRIPSI

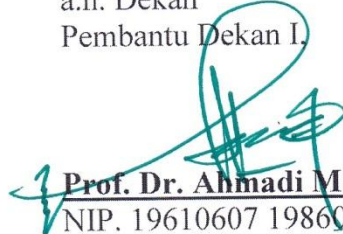
Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **NILA ALFANI**
No. Pokok : B111 11 283
B a g i a n : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan Asal-Usul Perkawinan (Studi Kasus 2012-2014 di Kota Palu)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2015

a.n. Dekan
Pembantu Dekan I.


Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H.,M.H.
NIP. 19610607 198601 1 003

ABSTRAK

NILA ALFANI (B111 11 283), dengan judul **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Asal Usul Perkawinan (Studi Kasus Tahun 2012 – 2014 Di Kota Palu)”**. Di bawah bimbingan H. M Said Karim selaku Pembimbing I dan Achmad selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan: mengetahui sebab – sebab terjadinya delik dalam kasus kejahatan terhadap asal usul perkawinan dan berbagai macam upaya baik yang bersifat preventif maupun represif dalam rangka untuk mencegah, mengurangi dan memberantas delik – delik kejahatan terhadap asal usul perkawinan di Kota Palu.

Penelitian ini dilakukan di Kota Palu, adapun yang menjadi objek penelitian adalah Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Palu, Kejaksaan Negeri Kota Palu, Kepolisian Resort Palu serta para pelaku dan keluarga para pelaku kejahatan asal usul perkawinan. Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan narasumber – narasumber pada setiap lokasi penelitian yang kompeten dan relevan dengan topik yang diajukan secara mendalam dan tajam yang kemudian hasil wawancara dipaparkan secara deskriptif lalu melakukan analisis secara psikologis, sosiologis dan yuridis. Serta mengambil data kepustakaan yang relevan, yaitu literatur, buku – buku, serta peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Hasil penelitian disimpulkan bahwa (1) terjadinya delik kejahatan terhadap asal usul perkawinan di kota palu disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu a) faktor keluarga yang tidak rukun; b) faktor kekerasan; c) faktor internal; d) faktor pemahaman agama yang kurang; e) faktor jarak tempat tinggal; f) faktor ketidakpahaman hukum. (2) upaya – upaya yang dilakukan dalam menanggulangi kejahatan terhadap asal usul perkawinan di Kota Palu adalah a) sosialisasi mengenai Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) oleh Pengadilan Negeri Palu; b) penyuluhan mengenai kejahatan yang terjadi pada suatu perkawinan oleh Aparat Kepolisian; c) membuat website yang dapat dengan mudah diakses oleh setiap Kantor Urusan Agama (KUA); d) memproses secara pidana pasangan pelaku kejahatan terhadap asal usul perkawinan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmannirrahim

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT., Rabb yang telah menciptakan manusia dan menetapkan hukum untuk mereka. Tuhan yang telah menegaskan bahwa “menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah” (al – An’aam:57) dan “hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka.” (al – Maaidah:49). Shalawat dan salam kita sampaikan kepada rasul yang mulia, Muhammad SAW yang telah mengimani, mengaplikasikan, dan mencotohkan pelaksanaan hukum – hukum Allah di seluruh aspek kehidupan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi isi maupun sistematika penulisannya. Oleh sebab itu saran dan kritik dari pembaca sangat diharapkan untuk perbaikan skripsi ini.

Karena skripsi ini tidak lepas dari agensi – agensi kreatif Allah SWT., maka untuk itu penulis ingin menghaturkan ucapan terima kasih setulus – tulusnya kepada para agensi ilahi tersebut, yakni kepada :

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta staf dan jajarannya;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. beserta staf dan jajarannya;

3. Wakil Dekan I , Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III yang telah berjuang dengan keras demi meningkatkan taraf dan mutu pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si. selaku Pembimbing I penulis dan Achmad, S.H.,M.H . selaku Pembimbing II penulis serta para Dosen Penguji yang telah banyak membantu memberikan arahan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan staf tata usaha beserta segenap civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu, nasihat, pelayanan urusan administrasi dan bantuan lainnya.

Pada kesempatan ini juga, penulis secara khusus mengucapkan terima kasih kepada orang – orang yang selama ini mendukung saya secara emosional maupun material, yaitu :

1. Kedua orang tua penulis, bapak Abdul Halim Amran, S.H.,M.H. dan ibu Norita, yang tak henti – hentinya memberikan penulis dukungan baik secara materil maupun non materil, serta selalu mendoakan agar segala sesuatu yang ditempuh memiliki makna.
2. Ketiga adik penulis Nana, Nandhi dan Nanda serta kakak penulis Sudarmin, S.H., yang selalu memberikan penulis semangat untuk tetap bertahan dalam menjalani pendidikan ini.
3. Sahabat – sahabat penulis, Ria, Ferdi, Ardi, Astrid, Har, aply, nita, emet, inna, icha, rida, andra, isra, ryan, helvi, mar'ie, ancha, iyyak, trie, adirwan dan fia, Chokerz, Mediasi, Sobat Lemina, dan Penyala Makassar. Yang telah

memberikan banyak semangat, kenangan indah dan masukan dalam penulisan skripsi ini.

4. Kakanda, teman teman dan adik adik dari UKM KGI FH-UH, UKM Karate-Do Unhas dan ALSA LC Unhas, saya ucapkan banyak terima kasih atas segala dukungan yang diberikan.

Harapan penulis semoga skripsi ini dapat berguna bagi para pembaca umumnya, dan khususnya bagi para Penegak Hukum, Akademisi Hukum, dan kawan – kawan yang berkecimpung dalam dunia hukum sehingga dapat menambah wawasan dan khasanah dalam berpikir.

Makassar, 21 Januari 2015

Nila Alfani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN	v
ABSTRAK	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Tinjauan Kriminologi	6
B. Kejahatan	10
1. Pengertian	12
2. Unsur – Unsur Kejahatan	14
3. Klasifikasi Kejahatan	13
4. Teori – Teori Penyebab Kejahatan	16
5. Teori – Teori Penanggulangan Kejahatan	20
C. Perkawinan	23
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Lokasi Penelitian	34
B. Jenis dan Sumber Data	34
C. Teknik Pengumpulan Data	35
D. Analisis Data	35
BAB IV PEMBAHASAN	37
A. Analisa Kriminologis Terhadap Pelaku Kejahatan Asal Usul Perkawinan	37
1. Data Kejahatan Terhadap Asal Usul Perkawinan	38
2. Alur Kriminologi	42
3. Faktor – faktor Penyebab terjadinya Kejahatan terhadap Asal	

Usul Perkawinan di Kota Palu	46
B. Upaya – Upaya yang dilakukan dalam Menanggulangi Kejahatan terhadap Asal Usul Perkawinan di Kota Palu	55
1. Sosialisasi mengenai Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) Oleh Pengadilan Negeri Palu	56
2. Penyuluhan mengenai Kejahatan yang terjadi pada suatu Perkawinan oleh Aparat Kepolisian	57
3. Membuat Website yang dapat dengan mudah di Akses oleh setiap Kantor Urusan Agama (KUA)	58
4. Memproses secara Pidana Pasangan Pelaku Kejahatan terhadap Asal Usul Perkawinan	59
BAB V PENUTUP	61
1. Kesimpulan	61
2. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang terkenal akan nuansa kesakralannya. Kebudayaan yang beragam serta adat yang kental bukanlah hal yang susah untuk ditemukan di negara ini. Salah satu hal yang sakral di Indonesia adalah ikatan perkawinan. Ikatan perkawinan adalah ikatan sepasang pemuda pemudi yang disatukan menjadi seorang suami istri untuk mencapai tujuan bersama dan untuk menjalankan salah satu dari perintah beragama.

Menurut Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1:

“Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pada pengertian di atas, dapat diketahui bahwa perkawinan merupakan sesuatu yang sakral karena bersifat bathin dan kekal yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, oleh karena itu, suatu perkawinan diharapkan dapat menjadi suatu hal yang dapat membuat masyarakat menjadi sejahtera.

Adapaun asas – asas suatu perkawinan diatur dalam Undang – Undang No.1 Tahun 1974, salah satu asas perkawinan adalah monogami¹. Yaitu seorang suami hanya boleh memiliki satu istri. Namun, pada pasal yang sama tercantum dibolehkannya poligami bagi golongan – golongan tertentu dan syarat – syarat

¹) Sudarsono, 1991. *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta: penerbit Rineka Cipta, hlm 244.

tertentu. Syarat – syarat untuk melakukan poligami diatur secara lengkap pada Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 3 sampai dengan pasal 5.

Undang – Undang No.1 Tahun 1974 telah diatur dengan lengkap dan runtut mengenai perkawinan, namun ada saja penyimpangan – penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat. Salah satu penyimpangan yang dilakukan adalah kejahatan asal usul perkawinan.

Kejahatan terhadap asal usul perkawinan di Indonesia merupakan suatu kejahatan yang jarang didengar namun banyak terjadi pada masyarakat yang berada di kota – kota tertentu yang memiliki jumlah penduduk padat. Kejahatan ini merupakan kejahatan yang kurang diminati untuk diperbincangkan karena hal ini merupakan hal yang berkaitan dengan urusan pribadi orang yang bersangkutan, selain itu, juga menimbulkan rasa malu pada korban dan keluarga korban/pelaku.

Warga masyarakat Indonesia juga banyak tidak mengetahui adanya jenis kejahatan ini, dikarenakan kurangnya sosialisasi mengenai jenis kejahatan ini. Masyarakat hanya mengetahui bahwa apabila suatu perkawinan terdapat penyimpangan atau kesalahan maka keadaan tersebut harus dilaporkan ke pengadilan agama untuk mengadakan pembatalan pernikahan atau perceraian. Padahal, suatu pernikahan yang dimana terjadi pada saat salah satunya masih terikat tali perkawinan dengan yang lain tanpa sepengetahuannya pihak yang lainnya, maka hal tersebut merupakan kejahatan terhadap asal – usul perkawinan.

Kejahatan terhadap asal usul perkawinan diatur dalam Pasal 279 KUHP

yaitu:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun :
 1. Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan – perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
 2. Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan – perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.
- 2) Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat (1) butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 3) Pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1-5 dapat dinyatakan. ”

Selain itu juga diatur dalam Pasal 280 KUHP

“Barangsiapa mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberitahukan kepada pihak lain bahwa ada penghalang yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, apabila kemudian berdasarkan penghalang tersebut, perkawinan lalu dinyatakan tidak sah.”

Kejahatan terhadap asal usul perkawinan ini,tak jarang terjadi di Kota Palu. Dalam tahun ini sampai pada bulan November 2014 terdapat 3 perkara yang telah diputus mengenai kejahatan terhadap asal – usul perkawinan, selain itu masih ada beberapa perkara yang masih dalam proses persidangan.

Dari informasi yang didapat, di Kota Palu kejahatan terhadap asal – usul perkawinan merupakan suatu hal yang sering terjadi dan tidak lagi menimbulkan rasa malu, oleh karena itu, korban dengan cepat melaporkannya kepada kepolisian terdekat.

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik bahwa kejahatan terhadap asal – usul perkawinan ini terjadi karena adanya kesenjangan antara apa yang

seharusnya dengan apa yang terjadi, seharusnya perkawinan terjadi karena keinginan seorang lelaki dan seorang wanita untuk mengikatkan diri menjadi sepasang suami isteri tanpa adanya kebohongan dan rahasia yang membuat suatu perkawinan menjadi tidak sah. Selain itu, suatu perkawinan juga merupakan suatu hal yang bersifat sakral dimana apabila sudah menjalin suatu ikatan maka salah satu pihak tidak boleh mengadakan ikatan perkawinan lagi tanpa sepengetahuan atau tanpa persetujuan pihak lainnya. Oleh karena hal tersebut dapat menghilangkan kesakralan suatu pernikahan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan diatas, maka masalah penelitian yang penulis dapat rumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor – faktor yang mendorong seseorang melakukan kejahatan terhadap asal – usul perkawinan di Kota Palu ?
2. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap kasus kejahatan terhadap asal – usul perkawinan di Kota Palu ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, ada beberapa tujuan yang melandasi penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor – faktor yang mendorong seseorang melakukan kejahatan terhadap asal usul perkawinan di Kota Palu.

2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap kasus kejahatan asal usul perkawinan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih kongkrit dari aparat penegak hukum dan pemerintah pusat terutama pada Pemerintah Daerah Kota Palu Sulawesi Tengah, sebagai hasil pertimbangan dan pemikiran ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan pengkajian ilmu hukum yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap asal usul Perkawinan.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pertimbangan dalam menangani tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat sebagai korban maupun pelaku tindak pidana, khususnya Pemerintah dan keseluruhan aparat kepolisian Kota Palu Sulawesi Tengah sebagai aparat penegak hukum dalam hal terjadinya Kejahatan terhadap Asal Usul Perkawinan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Kriminologi

Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sudah menyelidiki, mempelajari, dsb).

Sedangkan kriminologi menurut J.Constant adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor – faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat².

Skop (ruang lingkup pembahasan) kriminologi mencakup tiga hal pokok, yakni :³

1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (making laws).

yang dibahas dalam proses pembuatan hukum pidana (process of making laws) adalah :

- a. Definisi kejahatan
- b. Unsur – unsur kejahatan
- c. Relativitas pengertian kejahatan
- d. Penggolongan kejahatan
- e. Statistik kejahatan

2. Etiologi kriminal

²) A. S. Alam, 2010. *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Penerbit Pustaka Refleksi, hal 2.

³)Ibid,hal.2

Yang dibahas dalam etiologi kriminal (breaking laws) adalah sebagai berikut :

- a. Aliran – aliran (mazhab – mazhab) kriminologi
 - b. Teori – teori kriminologi
 - c. Berbagai perspektif kriminologi
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (reacting toward the breaking of laws).

Yang dibahas pada bagian ini adalah perlakuan terhadap pelanggar – pelanggar hukum (Reacting Toward the Breaking Laws) antara lain :

- a. Teori – teori penghukuman
- b. Upaya – upaya penanggulangan / pencegahan kejahatan, baik berupa tindakan pre-entif, preventif, repressif, dan rehabilitatif.

Penelitian kriminologi meliputi berbagai faktor, yang secara umum meliputi

.⁴

- a. Penelitian tentang sifat, bentuk, dan peristiwa tindak kejahatan serta persebarannya menurut faktor sosial, waktu, dan geografis.
- b. Ciri – ciri fisik dan psikologis, riwayat hidup pelaku kejahatan (yang menetap) dan hubungannya dengan adanya kelainan perilaku.
- c. Perilaku menyimpang dari nilai dan norma masyarakat, seperti perjudian, pelacuran, homoseksualitas, pemabuk, dsb.
- d. Ciri – ciri korban kejahatan
- e. Peranan korban kejahatan dalam proses terjadinya kejahatan

⁴) Susanto, S.I., 2011 .*Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal.39

- f. Kedudukan korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana
- g. Sistem peradilan pidana, yang meliputi bekerjanya lembaga
- h. Metode pembinaan pelaku pelanggaran kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan penghukuman dalam menangani pelaku pelanggaran hukum pidana sebagai bentuk reaksi sosial formal terhadap kejahatan hukum.
- i. Struktur sosial dan organisasi penjara
- j. Metode dalam mencegah dan mengendalikan kejahatan
- k. Penelitian terhadap kebijakan birokrasi dalam masalah kriminalitas, termasuk analisa sosiologis terhadap proses pembuatan dan penegakan hukum.
- l. Bentuk – bentuk reaksi non-formal masyarakat terhadap kejahatan, penyimpangan perilaku, dan terhadap korban kejahatan

Dalam perkembangan lahirnya teori – teori tentang kejahatan, dapat dibagi beberapa aliran⁵ :

1. Aliran Klasik

Landasan pemikiran aliran klasik adalah sebagai berikut :

- a. Individu dilahirkan dengan kehendak bebas (free will) hidup menentukan pilihannya sendiri.
- b. Dalam bertindak laku, manusia memiliki kemampuan untuk memperhitungkan segala tindakan berdasarkan keinginannya sendiri (hedonisme).
- c. Individu memiliki hak asasi diantaranya hak untuk hidup, kebebasan, dan memiliki kekayaan.

⁵). A. S. Alam, *Opcit.* hlm 32.

- d. Pemerintah negara dibentuk untuk melindungi hak – hak tersebut dan muncul sebagai hasil perjanjian sosial antara yang diperintah dan yang memerintah.
- e. Setiap warga negara hanya menyerahkan sebagian dari hak asasinya kepada negara sepanjang diperlukan oleh negara untuk mengatur masyarakat dan demi kepentingan bagian terbesar dari masyarakat.
- f. Kejahatan merupakan pelanggaran terhadap perjanjian sosial, oleh karena itu kejahatan merupakan kejahatan moral.
- g. Hukuman hanya dibenarkan selama hukuman itu ditujukan untuk memelihara perjanjian sosial
- h. Setiap orang dianggap sama di muka hukum.

2. Aliran Positivis

Aliran positivis terbagi atas dua bagian besar yakni : pertama determinasi biologis (biological determinism) perilaku manusia sepenuhnya tergantung pada pengaruh biologis yang ada dalam dirinya. Kedua determinasi cultural (cultural determinism) mendasari pemikiran mereka pada pengaruh sosial, budaya, dan lingkungan di mana seseorang hidup.

3. Aliran Social Defence

Social Defence dapat diartikan sebagai :

- a. Social defence tidak bersifat deterministic

- b. Social defence menolak tipologi yang bersifat kaku tentang penjahat dan menitikberatkan pada keunikan kepribadian manusia.
- c. Social defence meyakini sepenuhnya nilai – nilai moral.
- d. Social defence menghargai sepenuhnya kewajiban – kewajiban masyarakat terhadap penjahat. Dan mencoba menciptakan keseimbangan antara masyarakat dan penjahat serta menolak mempergunakan pendekatan yang bersifat security sebagai suatu alat administrative.
- e. Sekalipun mempergunakan penemuan – penemuan ilmu pengetahuan namun sosial defence menolak dikuasai olehnya dan menggantikannya dengan sistem modern “politik kriminal”.

Dari uraian di atas maka, dapat disimpulkan bahwa tinjauan kriminologi adalah hasil meninjau, menyelidiki dan mempelajari mengenai faktor – faktor sebab – musabab terjadinya suatu kejahatan serta cara menanggulangi suatu kejahatan.

B. Kejahatan

1. Pengertian

Kejahatan memiliki beberapa definisi, diantaranya dari sudut pandang hukum, kejahatan adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Sedangkan, menurut sudut pandang masyarakat, kejahatan adalah setiap

perbuatan yang melanggar norma – norma yang masih hidup dalam masyarakat.⁶

Adapun menurut D. Simons kejahatan diartikan sebagai *rechtsdelicten* yaitu perbuatan yang sifat tercelanya itu tidak semata – mata pada dimuatnya dalam UU melainkan memang pada dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam UU. Walaupun sebelum dimuat dalam UU pada kejahatan telah mengandung sifat tercela (melawan hukum) yakni pada masyarakat, jadi berupa melawan hukum materiil.⁷

Definisi kejahatan tidak hanya dari D.Simons, melainkan terdapat para ahli kriminologi yang mengemukakan definisi kejahatan, para ahli tersebut antara lain⁸ :

1. W.A Bonger (1936)

Kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapatkan reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian, sebagai reaksi – reaksi terhadap rumusan hukum (*legal defenition*) mengenai kejahatan.

2. Sue Titus Reid (1979)

Kejahatan adalah suatu tindakan sengaja (*Omissi*), dalam pengertian ini seseorang tidak hanya dapat dihukum karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak dapat juga dikatakan sebagai kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu. Disamping itu pula harus ada niat jahat (*criminal intent/meand rea*).

3. Sutherland

⁶) *Ibid*, hlm 16

⁷) Adami Chazawi, 2001. *Pelajaran Hukum Pidana bagian 1* .Jakarta: Penerbit Rajawali Pers, hlm 119.

⁸)Yesmil Anwar dkk ,2010. *Kriminologi*. Bandung : PT Refika Aditama.,hlm 178

Kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merugikan, terhadapnya negara beraksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.

4. Richard Quinney

Kejahatan adalah suatu rumusan tentang perilaku manusia yang diciptakan oleh yang berwenang dalam suatu masyarakat yang secara politis terorganisasi ; kejahatan merupakan suatu hasil rumusan perilaku yang diberikan terhadap sejumlah orang oleh orang lain ; dengan demikian, kejahatan adalah sesuatu yang diciptakan.

5. Hasskel dan Yablonsky

Kejahatan adalah yang tercatat dalam statistik; tak ada kesepakatan tentang perilaku anti sosial; sifat kejahatan dalam hukum pidana; hukum yang menyediakan perlindungan bagi seorang dari stigmatisasi yang tidak adil.

Selain itu, kejahatan juga dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang – undang atau tidak.⁹

Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, dimana perbuatan tersebut dianggap melanggar peraturan perundang – undangan maupun norma – norma yang hidup dalam masyarakat yang diawali oleh niat yang tidak baik sehingga diperlukan adanya hukuman.

2. Unsur – unsur kejahatan

Untuk menyebut sesuatu perbuatan sebagai kejahatan ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi. Ketujuh unsur tersebut adalah :

1. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (harm).

⁹)Masruchin Ruba'i, 2001. *Asas – Asas Hukum Pidana*. Malang:Penerbit UM Press, hlm 26.

2. Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Harus ada perbuatan (criminal act).
4. Harus ada maksud jahat (criminal intent = mens rea).
5. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.
6. Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan.
7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.¹⁰

3. Klasifikasi kejahatan

Kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat tidak hanya merugikan individu, melainkan merugikan banyak orang, organisasi maupun suatu komunitas. Kejahatan yang terjadipun tidak hanya sejenis melainkan memiliki banyak jenis sesuai dengan tujuan dan akibat yang ditimbulkan.

Adapun penggolongan kejahatan tersebut digolongkan berdasarkan beberapa pertimbangan¹¹ :

a. Motif Pelakunya

Bonger membagi kejahatan berdasarkan motif pelakunya sebagai berikut :

1. Kejahatan ekonomi (*economic crime*), misalnya penyelundupan.
2. Kejahatan seksual (*sexual crime*), misalnya perbuatan zinah.
3. Kejahatan politik (*political crime*), misalnya pemberontakan PKI.

¹⁰) A.s. Alam *Opcit*, hlm 18

¹¹) *ibid*, hlm 21

4. Kejahatan lain – lain (*miscellaneous crime*), misalnya penganiayaan dengan motif balas dendam.

b. Berat/Ringan Ancaman Pelakunya

1. Kejahatan, yakni semua pasal – pasal yang disebut didalam buku ke-II (Dua) KUHP. Seperti, pembunuhan, pencurian dll. Golongan inilah yang dalam bahasa inggris disebut *felony*. Ancaman pidana pada golongan ini kadang – kadang pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara sementara.
2. Pelanggaran, yakni semua pasal – pasal yang disebut di dalam buku ke-III (tiga) KUHP, seperti saksi di depan persidangan yang memakai jimat pada waktu ia harus memberikan keterangan dengan bersumpah, dihukum dengan hukuman kurungan selama 10 hari atau denda. Pelanggaran di dalam bahasa inggris disebut *misdemeanor*. Ancaman hukumannya biasanya hukuman denda saja.

c. Kepentingan Statistik

1. Kejahatan terhadap orang (*crime against persons*), misalnya pembunuhan, penganiayaan, dll.
2. Kejahatan terhadap harta benda (*crime against property*), misalnya pencurian, perampokan, dll.
3. Kejahatan terhadap kesusilaan umum (*crime against public decency*) misalnya perbuatan cabul.

d. Kepentingan Pembentukan Teori

Penggolongan ini didasarkan adanya kelas – kelas kejahatan. Kelas – kelas kejahatan ini dibedakan menurut proses penyebab kejahatan, cara melakukan kejahatan, tehnik – tehnik organisasinya dan timbulnya kelompok – kelompok yang mempunyai nilai – nilai tertentu pada kelas tersebut. Penggolongannya adalah :

1. Professional crime, adalah kejahatan dilakukan sebagai mata pencaharian tetapnya dan mempunyai keahlian tertentu untuk profesi itu. Contoh : pemalsuan tanda tangan, pemalsuan uang dan pencopetan.
2. Organized crime, adalah kejahatan yang tergorganisir. Contoh : pemerasan, perdagangan gelap narkotik, perjudian liar, dan pelacuran.
3. Occupational crime, adalah kejahatan karena adanya kesempatan. Contoh: pencurian dirumah – rumah, pencurian jemuran, penganiayaan dan lain lain.

e. Ahli – Ahli Sosiologi

1. *Violent personal crime* (kejahatan kekerasan terhadap orang), misalnya pembunuhan (*murder*), penganiayaan (*assault*), pemerkosaan (*rape*), dll.
2. *Occastional property crime*(kejahatan harta benda karena kesempatan). Contoh : pencurian kendaraan bermotor, pencurian di toko – toko besar (*shoplifting*).

3. *Occupational crime* (kejahatan karena kedudukan/jabatan).
Contoh : *white collar crime* (kejahatan kerah putih), seperti korupsi.
4. *Political crime* (kejahatan politik). Contoh, *treason* (pemberontakan), *espionage* (spionase), *sabotage* (sabotase), *guerilla warfare* (perang gerilya), dll.
5. *Public order crime* (kejahatan terhadap ketertiban umum), kejahatan ini biasa juga disebut “kejahatan tanpa korban” (*victimless crimes*): contoh pemabukan (*drunkness*), gelandangan (*vagrancy*), perjudian (*gambling*), wanita melacurkan diri (*prostitution*).
6. *Conventional crime* (kejahatan konvensional). Contoh : perampokan (*robbery*), penggarongan (*burglary*), pencurian kecil – kecilan (*larceny*), dll.
7. *Organized crime* (kejahatan terorganisir). contoh : pemerasan (*racketeering*), perdagangan wanita untuk pelacuran (*woman trafficking*), perdagangan obat bius, dll.
8. *Professional crime* (kejahatan yang dilakukan sebagai profesi).
Contoh : pemalsuan (*counterfeiting*), pencopetan (*pickpocketing*), dan lain – lain.

4. Teori – Teori Penyebab terjadinya Kejahatan

Kejahatan yang terjadi pada masyarakat memiliki penyebab atau alasan yang berbeda – beda, adapun alasan – alasan pelaku kejahatan

sangat beragam dan menyangkut banyak faktor. Alasan melakukan kejahatan banyak dipengaruhi dari faktor lingkungan, ekonomi, maupun psikologis seorang pelaku kejahatan.

Separovic mengemukakan, bahwa ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan, yaitu¹² :

- 1) Faktor personal, termasuk didalamnya faktor biologis (umur, jenis kelamin, keadaan mental, dan lain-lain) dan psikologis (agresivitas, kecerobohan dan keterasingan), dan
- 2) Faktor situasional, seperti situasi konflik, faktor tempat dan waktu.

Dalam perkembangan, terdapat beberapa faktor menjelaskan sebab- sebab kejahatan. Dari pemikiran itu, berkembanglah aliran atau mazhab – mazhab dalam kriminologi. Aliran – aliran tersebut antara lain :

- a. Aliran Pertama adalah aliran klasik. Aliran klasik timbul di Inggris, kemudian menyebar ke Eropa dan Amerika. Aliran ini berpendapat bahwa perbuatan manusia didasarkan atas pertimbangan rasa senang dan tidak senang. Setiap manusia berhak memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Perbuatan berdasarkan pertimbangan untuk memiliki kesenangan atau sebaliknya yaitu penderitaan. Dengan demikian, setiap perbuatan yang dilakukan sudah tentu lebih banyak mendatangkan kesenangan dengan konsekuensi yang telah dipertimbangkan, walaupun dengan pertimbangan perbuatan tersebut lebih banyak mendatangkan kesenangan. Aliran ini menganggap bahwa *setiap individu telah mempunyai hitungan sendiri – sendiri*

¹²) Weda, 1996. *Kriminologi* Jakarta: Grafindo Persada, hlm. 9

*mengenai untung dan ruginya, dari perbuatan yang akan dilakukannya itu*¹³.

- b. Aliran kedua adalah kartrograpik, aliran ini dikembangkan di Prancis dan menyebar ke Inggris dan Jerman. Aliran ini memperhatikan penyebaran kejahatan pada wilayah tertentu berdasarkan faktor geografik dan sosial. Aliran ini berpendapat bahwa kejahatan merupakan perwujudan dari kondisi – kondisi sosial yang ada.
- c. Aliran ketiga adalah sosialis, aliran ini bertolak dari ajaran Marx dan Engels, yang berkembang pada tahun 1850 dan berdasarkan atas determinisme ekonomi. Menurut para tokoh aliran ini, kejahatan timbul disebabkan adanya sistem ekonomi kapitalis yang diwarnai dengan penindasan terhadap buruh, sehingga menciptakan faktor – faktor yang mendorong berbagai penyimpangan.
- d. Aliran keempat adalah tipologi, ada tiga kelompok yang termasuk dalam aliran ini, yaitu Lambrossin, Mental Tester, dan psikiatrik yang mempunyai kesamaan pemikiran dan mitologi. Mereka mempunyai asumsi bahwa perbedaan anat penjahat terletak pada sifat tertentu pada kepribadian yang mengakibatkan seseorang tertentu berbuat kejahatan dan seseorang lain berbuat kejahatan mungkin diturunkan dari orangtua atau merupakan ekspresi dari sifat – sifat kepribadian dan keadaan maupun proses – proses lain yang menyebabkan adanya potensi – potensi pada orang tersebut.¹⁴

¹³ Yesmil Anwar, *Op cit.* hlm. 195

¹⁴ Soedjono Dirjosisworo, 1994. *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, Hlm. 32.

Ketiga kelompok tipologi ini memiliki kesamaan dalam penentuan ciri khas yang membedakan penjahat dan bukan penjahat. Ada beberapa proposisi yang dikemukakan oleh Lambroso, yaitu¹⁵ :

- 1) Penjahat dilahirkan dan mempunyai tipe yang berbeda – beda.
- 2) Tipe ini biasa dikenal dari beberapa ciri tertentu seperti tengkorak yang simetris, rahang bawah yang panjang, hidung yang pesek, rambut panjang yang jarang dan tahan terhadap rasa sakit, tanda ada bersamaan jenis tipe penjahat, tiga sampai lima diragukan dan dibawah mungkin bukan penjahat.
- 3) Tanda – tanda lahiriah ini bukan merupakan penyebab kejahatan tetapi merupakan tanda pengenal kepribadian yang cenderung mempunyai perilaku kriminal. Ciri – ciri ini merupakan pembaharuan sejak lahir.
- 4) Karena adanya kepribadian ini, maka tidak dapat menghindar dari melakukan kejahatan kecuali bila lingkungan dan kesempatan tidak memungkinkan, dan
- 5) Penjahat – penjahat seperti pencuri, pembunuh, pelanggar seks dapat dibedakan oleh tanda tertentu.

Setelah menghilangnya aliran Lambroso, muncullah aliran mental tester. Aliran ini dalam metodologinya menggunakan tes mental. Menurut *Goddart*, setiap penjahat adalah orang yang *feeble mindedness* (orang yang otaknya lemah)¹⁶. Orang yang seperti ini tidak dapat menilai akibat perbuatannya tersebut. Kelemahan otak merupakan pembawaan sejak lahir serta penyebab orang melakukan kejahatan.

Kelompok lain dari aliran tipologi adalah psikiatrik. Aliran ini lebih menekankan pada unsur psikologi, yaitu gangguan emosional. Oleh karena itu, aliran ini berpendapat bahwa setiap orang dapat

¹⁵ Logcit, hlm,32

¹⁶) Weda, *Opcit* hlm 18

melakukan suatu perbuatan jahat tanpa adanya pengaruh – pengaruh jahat dari sekitar serta situasi – situasi sosialnya.

- e. Aliran kelima adalah aliran sosiologi, aliran ini menganalisis sebab – sebab kejahatan dengan memberikan interpretasi, bahwa kejahatan sebagai “*a function of enviroment*” tema sentral aliran ini adalah Sutherland, ia mengemukakan bahwa perilaku yang dipelajari di dalam lingkungan sosial. Semua tingkah laku sosial dipelajari dengan berbagai cara.
- f. Pengaruh Positivisme Ilmu. Pengaruh positivisme ilmu mengatakan bahwa orang yang melakukan kejahatan, karena adanya pengaruh dari lingkungan, seperti pergaulan, faktor lingkungan ekonomi, seperti kemiskinan, semboyan Aliran Pengaruh Positivisme ini adalah “*Die welt ist Mehr Schuld an mir, als ich*” (Bahwa dunia lebih bertanggung jawab terhadap bagaimana jadinya saya, daripada saya sendiri)¹⁷.
- g. Kombinasi (Klasik dan Positivisme Ilmu), menurut aliran ini (kombinasi), yang dipelopori oleh murid Lombroso, yakni Enrico Ferry (1856 - 1929), bahwa kejahatan terletak pada faktor – faktor Bio-Sosiologis atau Bakat dan Lingkungan, yang secara bersama – sama member pengaruh terhadap pribadi dan kondisi seseorang yang pada saatnya dapat berbuat jahat.

Enrico lebih memberikan penekanan pada kesalinghubungan (interrelatedness) dari faktor – faktor sosial, ekonomi, politik yang

¹⁷ Yesmil Anwar, *opcit.* hlm 196

mempengaruhi kejahatan. Menurutnya bahwa kejahatan dapat dijelaskan melalui: Studi pengaruh – pengaruh interaktif diantara faktor – faktor fisik (ras, geograpis, temperatur); faktor – faktor sosial (umur, jenis kelamin, variabel – variabel psikologis); kejahatan dapat juga dikontrol dan diatasi dengan perubahan sosial (subsidi perumahan, kontro kelahiran, kebebasan menikah, dan bercerai)¹⁸.

5. Teori – Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan adalah masalah sosial yang dihadapi oleh seluruh masyarakat semenjak dahulu hingga sekarang yang pada hakikatnya merupakan hasil perbuatan dari masyarakat sendiri. Adapaun upaya pemerintah sangat beragam dalam menanggapi kejahatan dan pelaku kejahatan tersebut, namun kejahatan yang terjadi dalam masyarakat tak kunjung berkurang.

Menyadari tingginya tingkat kejahatan, maka secara langsung atau tidak langsung mendorong pula perkembangan dan pemberian reaksi terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan pada hakikatnya berkaitan dengan maksud dan tujuan dari usaha penanggulangan kejahatan tersebut.

Menurut Hoefnangels, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan cara¹⁹ :

a) *Criminal Application* (Penerapan Hukum Pidana)

Contohnya : penerapan pasal 354 KUHP dngan hukuman maksimal yaitu 8 tahun baik dalam tuntutan maupun putusannya.

¹⁸ Yesmil Anwar, *opcit.* hlm 199

¹⁹) Arif Gosita, 2009. *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Universitas Trisakti. hlm 2

b) *Preventif without punishment* (Pencegahan tanpa Pidana)

Contohnya : dengan menerapkan hukuman maksimal pada pelaku kejahatan, maka secara tidak langsung memberikan prevensi (pencegahan) kepada publik walaupun ia tidak dikenal hukuman atau *shock therapy* kepada masyarakat.

c) *Influencing views of society on crime and punishment* (Media massa mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pandangan lewat media massa).

Contohnya : mensosialisasikan suatu undang – undang dengan memberikan gambaran tentang bagaimana delik itu dan ancaman hukumannya.

Selain upaya penanggulangan diatas terdapat pula strategi kebijakan penanggulangan/pencegahan kejahatan menurut kongres – kongres PBB, yang pada garis besarnya sebagai berikut²⁰ :

- a. Strategi dasar/pokok penanggulangan kejahatan, ialah meniadakan faktor – faktor penyebab/kondisi yang menimbulkan terjadinya kejahatan.
- b. Pencegahan kejahatan dan peradilan pidana harus ditempuh dengan kebijakan integral/sistemik (jangan simplistik dan fragmentair).
- c. Kejahatan – kejahatan yang mendapat perhatian Kongres PBB untuk ditanggulangi.

²⁰ Barda Nawawi Arief, 2008. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, hlm 81

- d. Perlu dibenahi dan ditingkatkan kualitas aparat penegak hukum.
- e. Perlu dibenahi dan ditingkatkan kualitas institusi dan sistem manajemen organisasi/manajemen data.
- f. Disusunnya beberapa “*Guidelines*”, “*Basic Principles*”, “*Rules*”, “Standard Minimum Rules (RMS)”.
- g. Ditingkatkannya “kerja sama internasional” (international cooperation) dan “bantuan teknis” (technical assistance) dalam rangka memperkuat “the rule of law” dan “management of criminal justice system”.

Penanggulangan kejahatan dapat diartikan secara luas dan sempit. Secara luas, maka pemerintah beserta masyarakat sangat berperan. Bagi pemerintah adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang – undangan dan badan – badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan normal – normal sentral dari masyarakat. Sedangkan, peran masyarakat adalah masyarakat dituntut untuk peka terhadap lingkungan sekitar, sigap dalam melaporkan apabila melihat adanya ciri – ciri perbuatan jahat yang dilakukan di lingkungan sekitar.

Secara sempit lembaga yang bertanggung jawab atas usaha pencegahan kejahatan adalah polisi. Namun, karena terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh polisi telah mengakibatkan tidak efektifnya tugas mereka. Lebih jauh polisi juga tidak memungkinkan mencapai tahap ideal pemerintah, sarana dan prasarana yang berkaitan dengan usaha

pencegahan kejahatan. Oleh karena itu, peran serta masyarakat dalam kegiatan pencegahan kejahatan menjadi hal yang sangat diharapkan.

C. Perkawinan

Perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 1 ayat (1) adalah

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Adapun enam asas yang bersifat prinsipil di dalam Undang – Undang perkawinan sebagai berikut²¹ :

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing – masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- b. Dalam undang – undang ini ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap – tiap perkawinan “harus dicatat” menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- c. Undang – undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang

²¹)Ahmad Rofiq. 2013, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada., hlm. 48.

bersangkutan mengizinnannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.

- d. Undang – undang Perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami isteri itu telah harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang – undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.
- f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

Perkawinan tidak dapat dilakukan hanya karena keinginan kedua belah pihak, namun perkawinan yang akan dilakukan dapat terjadi apabila memenuhi syarat – syarat perkawinan yang telah ditentukan dalam UU Perkawinan maupun syarat – syarat lainnya. Adapun syarat – syarat tersebut adalah :

- a) Syarat – syarat perkawinan dalam hukum positif (Undang-Undang)

Adapun syarat – syarat yang lebih dititik beratkan kepada orangnya diatur di dalam UU No.1 Tahun 1974 Pasal 6 sebagai berikut²² :

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang – orang yang disebut dalam ayat 2,3, dan 4 pasal ini, atau salah

²²) Sudarsono, *Opcit*, hlm 40

seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang – orang tersebut dalam ayat 2,3, dan 4 pasal ini.

6) Ketentuan tersebut ayat 1 – ayat 5 pasal ini berlaku sepanjang hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

b) Syarat – syarat menurut agama (rukun nikah)

Syarat dan rukun perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam, dimana syarat – syarat perkawinan mengikuti rukun – rukunnya sebagaimana dikemukakan Kholil Rahman, antara lain²³ :

1) Calon mempelai Pria

Calon mempelai pria yang akan melaksanakan perkawinan harus sesuai dengan syarat – syarat, yaitu :

1. Beragama Islam.
2. Laki – laki.
3. Jelas orangnya.
4. Dapat memberikan persetujuan.

²³) Ahmad Rofiq, *Opcit*, hlm 55.

5. Tidak terdapat halangan perkawinan.

2) Calon mempelai Wanita

Calon mempelai wanita yang akan melaksanakan perkawinan harus sesuai dengan syarat – syarat, yaitu :

1. Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani.
2. Perempuan.
3. Jelas orangnya.
4. Dapat dimintai persetujuannya.
5. Tidak terdapat halangan perkawinan.

3) Wali Nikah

Untuk menjadi wali nikah, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Laki – laki.
2. Dewasa.
3. Mempunyai hak perwalian.
4. Tidak terdapat halangan perkawinan.

4) Saksi Nikah

Orang yang menjadi saksi nikah, juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Minimal dua orang lelaki.
2. Hadir dalam *ijab qabul*.
3. Dapat mengerti maksud akad.

4. Islam.
5. Dewasa.

5) *Ijab Qabul*

Ijab Qabul bukan hanya sebuah pernyataan yang diucapkan kedua mempelai melainkan pernyataan yang memiliki syarat – syarat sebagai berikut :

1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
3. Memakai kata – kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah atau tazwij.
4. Antara *ijab* dan *qabul* bersambungan.
5. Antara *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya.
6. Orang yang terjait dengan *ijab qabul* tidak sedang dalam ihram haji/umrah.
7. Majelis *ijab* dan *qabul* itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu : calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atas wakilnya, dan dua orang saksi.

Dalam perkembangan masyarakat di seluruh dunia, ternyata perkawinan tidak hanya satu bentuk melainkan banyak bentuknya, adapun bentuk – bentuk perkawinan adalah²⁴ :

1. Hipogami dan Hipergami

Suatu bentuk perkawinan antara seorang laki – laki dengan seorang wanita maupun antara seorang wanita dengan laki - laki yang memiliki kedudukan sederajat atau dibawahnya disebut hipogami. Kedudukan dalam hipogami menurut islam hanya didasarkan atas nilai agama (religious equality). Maksudnya laki – laki yang menganut agama selain islam statusnya lebih rendah disbanding dengan wanita muslim. Dengan demikian, seorang wanita islam (Muslimah) tidak layak bersedia dinikahi oleh laki – laki di luar muslim. Adapun apabila di dalam perkawinan tersebut seorang laki – laki menikahi seorang wanita maupun seorang wanita dengan seorang laki – laki yang sederajat atau yang lebih tinggi disebut hipergami. Di dalam hukum islam kedua bentuk perkawinan tersebut di perbolehkan; hipogami dan hipergami tidak dilarang.

2. Homogami dan Heterogami

Jika perkawinan antara laki – laki dan perempuan dimana keduanya memiliki kedudukan yang sama disebut homogami.

²⁴)Sudarsono, *Opcit*, hlm 57

Heterogami yaitu, suatu perkawinan antara laki – laki dan perempuan yang memiliki perbedaan kedudukan sosialnya; jadi keduanya tidak memenuhi syarat – syarat kafa'ah, contoh heterogami dalam islam, perempuan muslim kawin dengan laki – laki musyrik, wanita baik – baik kawin dengan laki – laki pezina dan sebaliknya.

3. Monogami, Poligami dan Poliandri

Monogami adalah pernikahan antara seorang laki – laki dengan seorang perempuan. Poligami adalah pernikahan antara seorang laki – laki dengan dua sampai empat orang perempuan. Poliandri adalah perkawinan antara seorang perempuan dengan beberapa orang laki – laki.

4. Endogami dan Eksogami

Perkawinan endogami ialah suatu bentuk perkawinan / pernikahan yang berlaku dan atau dianut di dalam masyarakat yang hanya memperbolehkan anggota masyarakat melakukan perkawinan/pernikahan dengan anggota yang lain di dalam clannya sendiri. Sedangkan perkawinan eksogami adalah perkawinan/pernikahan anatara anggota masyarakat clan satu dengan anggota masyarakat clan lainnya.

Walaupun salah satu prinsip perkawinan adalah monogami, namun apabila salah satu agama memperbolehkan seorang laki – laki memiliki lebih dari seorang istri maka prinsip tersebut dapat dikesampingkan, adapun seorang

suami yang memiliki lebih dari seorang isteri disebut poligami. Poligami boleh dilakukan apabila dikehendaki oleh pihak – pihak yang bersangkutan dan pengadilan telah memberikan izin. adapun menurut Pasal 4 ayat (2) Undang – undang Perkawinan²⁵ :

pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain alasan – alasan diatas untuk berpoligami, syarat – syarat dibawah ini harus dipenuhi. Dalam pasal 5 UU Perkawinan dijelaskan²⁶:

1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang – undang ini harus dipenuhi syarat – syarat sebagai berikut:
 - a) Adanya persetujuan dari istri/istri – istri.
 - b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan – keperluan hidup istri – istri dan anak – anak mereka.
 - c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak – anak mereka.
2. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri – istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang – kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab – sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Seiring dengan berkembangnya masyarakat, perkawinan yang terjadi dalam masyarakat tak lagi patuh dan taat terhadap peraturan perundang – undangan maupun norma – norma pada masyarakat. Selain itu, kecenderungan

²⁵) Ahmad Rofiq, *Opcit*, hlm 140

²⁶ *Ibid*, hlm 141

poligami tanpa izin pengadilan masih banyak dilakukan oleh masyarakat yang ingin menyembunyikan status pernikahannya kepada calon pasangannya, perbuatan tersebut merupakan Kejahatan Terhadap Perkawinan.

Kejahatan terhadap perkawinan diatur dalam KUHP Pasal 279 dan 280.

Pasal 279

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun :
 1. Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan – perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
 2. Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan – perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.
- 2) Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat (1) butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 3) Pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1-5 dapat dinyatakan. ”

Pasal 280

“Barangsiapa mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberitahukan kepada pihak lain bahwa ada penghalang yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, apabila kemudian berdasarkan penghalang tersebut, perkawinan lalu dinyatakan tidak sah.”

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam tulisan ini, maka penelitian dilakukan di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Pemilihan lokasi tersebut berdasarkan pada pertimbangan bahwa sering terjadi peristiwa yang akan menjadi objek penelitian di daerah itu.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data yang dikumpul dari responden baik melalui wawancara langsung, dengan kata lain adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian.

Responden pada data primer penelitian ini adalah Penyidik pada Polresta Palu, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Palu, Hakim pada Pengadilan Negeri Palu serta para pelaku dan keluarga pelaku Kejahatan Terhadap Asal Usul Perkawinan.

b. Data Sekunder

Data berupa dokumen – dokumen penting yang didapatkan oleh peneliti.

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data tersebut antara lain :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu data yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Seperti : Pancasila, UUD 1945 serta Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa teori dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan. Seperti : Undang - undang, jurnal, makalah dan buku – buku mengenai objek penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan – bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder. Seperti : Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Belanda dan Kamus Hukum Kontemporer.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah :

a. Wawancara

Mengumpulkan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan mengajukan pertanyaan yang telah dibuat terlebih dahulu kepada responden yang berkaitan dengan objek penelitian.

b. Pengamatan

Mengadakan pengamatan secara intensif langsung ke lokasi penelitian.

c. Studi Kepustakaan

Mempelajari dan mengumpulkan data dari literatur, jurnal hukum dan peraturan – peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan maupun lapangan diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif artinya analisis data berdasarkan

apa yang diperoleh dari kepustakaan maupun lapangan baik secara lisan maupun tertulis, kemudian diarahkan, diteliti, diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku serta perbandingan, kemudian dituangkan ke dalam suatu kesimpulan dengan metode induktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal umum ke hal – hal yang khusus.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Analisis Kriminologis Terhadap Pelaku Kejahatan Asal Usul Perkawinan

Sejak tahun 2012 sampai dengan 2014 telah terjadi Lima kasus yang telah divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Kota Palu ihwal kejahatan terhadap asal usul perkawinan. Kelima kasus tersebut ditinjau dari sisi yuridis telah sah dan merupakan perbuatan melawan hukum yang membebankan pertanggungjawaban terhadap pelakunya. Objek studi ini mengambil bentuk melalui aliran yuridis. Aliran ini menyatakan bahwa sasaran perhatian yang layak bagi objek studi kriminologi adalah mereka yang diputuskan oleh pengadilan pidana sebagai seseorang yang bersalah melakukan delik oleh karena perbuatan yang dilakukannya.

Menurut salah seorang polisi pada kepolisian Resort Palu Jusri Tandena (wawancara tanggal 29 Desember 2014), bahwa kebanyakan pelapor adalah perempuan dimana posisinya sebagai istri sah para pelaku walaupun ada beberapa adalah lelaki yang posisinya sebagai suami sah para pelaku. Adapun upaya awal dari pihak kepolisian adalah meminta bukti awal dari pelapor, salah satu bukti awal pada delik ini adalah fotokopi buku register catatan Perkawinan di dari Kantor Urusan Agama (KUA).

Adapun kejahatan ini, dapat dihindari apabila pegawai Kantor Urusan Agama dengan teliti memeriksa berkas atau kelengkapan surat – surat yang disetor calon pengantin.

1. Data Kejahatan terhadap Asal Usul Perkawinan

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), ditugaskan oleh negara sebagai penyidik tunggal terhadap setiap tindak pidana umum. Hal ini dapat dilihat dalam KUHP Pasal 6 Ayat (1) sub a, bahwa penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia.

Kejahatan terhadap asal usul perkawinan sebagai tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP dan merupakan wewenang kepolisian untuk mengadakan penyidikan, sehingga di Kepolisian dapat diketahui tentang jumlah kejahatan terhadap asal usul perkawinan yang dilakukan oleh warga masyarakat. Seperti halnya dengan daerah lain, di Sulawesi Tengah pada umumnya dan Kota Palu pada khususnya, tidak luput pula dari gangguan keamanan dan ketertiban dalam bentuk kejahatan yang menjadi problematika sosial khususnya kejahatan terhadap asal usul perkawinan. Hal ini membawa dampak negatif terhadap psikologis anak maupun suami atau istri sebelumnya. Kejahatan ini juga bertolak belakang dengan norma sosial maupun norma agama yang dianut oleh masyarakat pada umumnya.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat perkembangan kejahatan yang terjadi di Kota Palu khususnya kejahatan terhadap asal usul perkawinan, maka di bawah ini akan disajikan data kejahatan yang terjadi di Kota Palu

secara umum dan secara khusus mengenai kejahatan terhadap asal usul perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu dari tahun 2012 sampai tahun 2014.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di kantor Mapolrestabes Kota Palu, jumlah kasus kejahatan yang dilakukan di Kota Palu secara umum dari tahun 2012 sampai tahun 2014 secara keseluruhan tercatat ada 9705 kasus. Dari total kasus kejahatan tersebut, enam diantaranya adalah kejahatan terhadap asal usul perkawinan. Untuk lebih jelasnya penulis memaparkan dalam bentuk tabel di bawah ini :

Tabel 1

Kasus kejahatan yang terjadi di Kota Palu secara umum, kurun waktu 2012-2014

No	Tahun	Laporan
1	2012	2984
2	2013	3425
3	2014	3296
Jumlah		9705

Sumber : Mapolresta Palu, 2014

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa intensitas kasus kejahatan secara umum di Kota Palu meningkat di tahun 2013 lalu menurun

di tahun 2014. Pada tahun 2012 tercatat laporan yang masuk sebanyak 2984 kasus. Pada tahun 2013 tercatat laporan yang masuk sebanyak 3425 dan pada tahun 2014 tercatat laporan yang masuk sebanyak 3296 kasus.

Tabel 2

Kasus kejahatan asal usul perkawinan di Kota Palu kurun waktu 2012-2014

No	Tahun	Laporan	Selesai
1	2012	2	2
2	2013	2	1
3	2014	2	2
Jumlah		6	5

Sumber: Mapolresta Palu, 2014

Berdasarkan data pada tabel 2, dapat disimpulkan bahwa kejahatan terhadap asal usul perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Kota Palu tidak meningkat dan tidak menurun. Pada tahun 2012 terdapat dua laporan yang masuk dan kedua duanya dapat diselesaikan. Adapun satu kasus yang seharusnya memiliki dua terdakwa yaitu suami dan istri, pada saat berkas sampai ke Pengadilan hanya berkas terdakwa istri, berkas terdakwa suami tidak ikut dilimpahkan. Pada tahun 2013 terdapat dua laporan yang masuk, namun hanya satu kasus yang dapat diselesaikan. Pada tahun 2014 terdapat dua laporan yang masuk dan kedua duanya dapat diselesaikan. Secara

keseluruhan kasus kejahatan terhadap asal usul perkawinan dapat diselesaikan dengan baik oleh pihak kepolisian.

Hasil penelitian penulis di kantor Mapolrestabes Kota Palu, kasus kejahatan terhadap asal usul perkawinan ini tak jarang memiliki dua terdakwa yaitu si suami dan si istri. Adapun salah satunya tidak dapat dijadikan terdakwa apabila benar – benar tidak mengetahui bahwa pasangan mereka telah memiliki ikatan perkawinan yang sah sebelumnya dan belum bercerai. Selain itu, pada kasus ini, penyidik kepolisian selalu menuliskan dua pasal yang patut diduga dilakukan oleh terdakwa yaitu Pasal 279 KUHP tentang Kejahatan terhadap asal usul perkawinan dan Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan surat serta Pasal 55 KUHP tentang Penyertaan.

Namun ketika berkas sampai di kantor Kejaksaan, berkas dakwaan para jaksa hanya memuat Pasal 279 KUHP tentang Kejahatan Asal Usul Perkawinan. Menurut Ahmad Fuadi jaksa pada Kejaksaan Negeri Palu (wawancara tanggal 30 Desember 2014), jaksa hanya memuat satu pasal atau dakwaan tunggal karena hanya pasal tersebut yang dapat dengan mudah untuk dibuktikan, sedangkan untuk pasal 263 KUHP susah untuk dibuktikan. Adapun berkas satu kasus yang memiliki dua terdakwa, berkas kedua terdakwa terpisah (*splitsing*) karena ayat pada pasal yang dikenakan berbeda.

2. Alur Kriminologi

Pada tahun 2012, terdapat dua kasus dimana pada kasus pertama pelaku A mengatakan bahwa ia melakukan kejahatan terhadap asal usul perkawinan dikarenakan suami pelaku sering melakukan pemukulan sehingga pelaku tidak tahan dan lari bersama pelaku B. Sedangkan pelaku B melakukan kejahatan karena merasa sayang pada pelaku A, dan suami pelaku A tidak ingin diceraikan sehingga pelaku B mengajak pelaku A untuk lari dan melakukan pernikahan. Setelah itu pelaku A dan pelaku B melaksanakan pernikahan di Kota Palu.

Dari posisi kasus pertama di atas dapat diuraikan bahwa motif pelaku A dalam melakukan kejahatan terhadap asal usul perkawinan adalah

- Sering mendapatkan kekerasan fisik dari suami
- Suami tidak ingin diceraikan

Sedangkan motif pelaku B dalam melakukan kejahatan terhadap asal usul perkawinan adalah

- Merasa iba akan pelaku A
- Rasa sayang pelaku B ke pelaku A

Pada kasus kedua, pelaku C melakukan kejahatan terhadap asal usul perkawinan didasari atas ketidakharmonisan dengan sang istri. Istri pelaku C berselingkuh sehingga pelaku C berselingkuh dengan pelaku D, dan menyebabkan pelaku D berbadan dua, sehingga pelaku C merasa harus

bertanggung jawab dan menikahi pelaku D tanpa meminta persetujuan istri sah.

Dari posisi kasus kedua, dapat disebutkan bahwa motif pelaku C dalam melakukan kejahatan terhadap asal usul perkawinan adalah

- Ketidakharmonisan rumah tangga sebelumnya
- Rasa tanggung jawab karena telah menghamili pelaku D

Sedangkan motif pelaku D melakukan kejahatan terhadap asal usul perkawinan adalah karena telah berbadan dua dan untuk menutupi malu keluarga.

Pada tahun 2013 hanya satu kasus yang diproses dan terdapat dua terdakwa yang mana berkasnya dipisah (*splitsing*). Pelaku E mengatakan bahwa ia melakukan kejahatan terhadap asal usul perkawinan didasari atas rasa suka terhadap tetangga kamar rumah susun pelaku. Pelaku E mengatakan bahwa pada tahun 2012 pelaku E bekerja di luar kota dan tinggal secara terpisah dengan sang istri. Selama bekerja pelaku E tinggal di salah satu kamar pada rumah susun. Pada saat itu, pelaku E berhadapan kamar dengan pelaku F, pelaku F saat itu masih memiliki suami yang sah dan tinggal bersama. Setelah beberapa bulan pelaku F ternyata mengalami permasalahan rumah tangga dengan sang suami dan sering curhat dengan pelaku E. Akhirnya pelaku F bercerai dan menjalin hubungan dengan pelaku E karena pelaku E mengaku telah duda. Pada bulan Desember 2012 pelaku E dan pelaku F melakukan pernikahan di kantor KUA Palu Timur. Setelah

menikah pelaku E mengaku kepada pelaku F bahwa dirinya tidak berstatus duda melainkan masih terikat tali perkawinan yang sah dengan istri pertama, pelaku E tidak meminta izin istri pertama karena takut tidak diizinkan.

Dari kasus di atas, ternyata motif pelaku E melakukan kejahatan terhadap asal usul perkawinan adalah

- Tempat tinggal yang berjauhan dengan istri pertama
- Takut meminta izin kepada istri pertama karena tidak akan diberi izin untuk menikah lagi

Sedangkan pelaku F yang awalnya tidak mengetahui seharusnya tidak menjadi terdakwa, namun karena dianggap telah mengetahui oleh penyidik kepolisian sehingga turut menjadi terdakwa.

Tahun 2014 terdapat dua kasus, pada kasus pertama pelaku melakukan kejahatan didasari motif yang sama dengan kasus kedua pada tahun 2012 yaitu pelaku G tidak merasa rukun dengan istri pertama sehingga berselingkuh dengan pelaku H. Pelaku H mengetahui bahwa pelaku G telah berisitri, namun karena selalu dibujuk pelaku H pun tetap menjadi selingkuhan pelaku G dan akhirnya pelaku H berbadan dua yang membuat pelaku G dan pelaku H menikah di kantor KUA Palu Barat.

Dari posisi kasus di atas maka dapat dilihat bahwa motif pelaku G dalam melakukan kejahatan terhadap asal usul perkawinan adalah

- Keadaan rumah tangga yang tidak rukun

- Pelaku H telah berbadan dua sehingga pelaku G merasa bertanggungjawab untuk menikahinya.

Dan motif dari pelaku H adalah karena telah berbadan dua sehingga untuk menutup malu dan agar anaknya nanti dapat memiliki akta kelahiran maka pelaku melakukan kejahatan terhadap asal usul perkawinan. Adapun berkas dakwaan pelaku terpisah (splittings)

Adapun kasus kedua pada tahun 2014, pelaku I mengatakan bahwa ia melakukan kejahatan terhadap asal usul perkawinan didasari oleh ketidakpahaman pelaku terhadap upaya hukum. Pelaku I mengatakan bahwa keadaan rumah tangga pelaku dengan istri sudah tidak harmonis, dimana sering terjadi pertengkaran sehingga pelaku mengajukan cerai kepada istri, dan telah diputus verstek oleh Pengadilan Agama Bulukumba. Namun istri pelaku melakukan upaya hukum verset (upaya hukum melawan putusan verstek), pelaku I telah diberikan salinan surat mengenai upaya tersebut dan ternyata pelaku tidak mengerti dan mengira bahwa putusan verstek tersebut telah berkekuatan hukum tetap (incraht). Setelah itu pelaku pergi ke Kota Palu untuk bekerja dan menikah lagi dengan berstatus duda (dengan mengajukan salinan surat putusan cerai verstek dari Pengadilan Agama Bulukumba), padahal upaya hukum yang diajukan istri belum selesai, sehingga perkawinan pertama masih dianggap sah dan belum putus secara hukum.

Dari posisi kasus di atas, dapat ditarik bahwa motif pelaku I adalah ketidakpahaman pelaku terhadap persoalan hukum yang sedang dijalani, serta ketidaktahuan pelaku terhadap upaya hukum verset.

3. Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan terhadap Asal Usul Perkawinan di Kota Palu

Pada pembahasan sebelumnya, telah dipaparkan berbagai motif masing – masing pelaku yang menjadi subjek penelitian dalam skripsi ini. Sedangkan pada bab ini akan dipaparkan analisis terhadap motif – motif tersebut. Dari hasil penelitian, ditemukan ada enam faktor yang berpengaruh, yang masing – masing faktor jika ditinjau dari sudut pandang keharusannya dapat menjadi sebab tunggal maupun sebagai sebab penunjang. Sebab – sebab tersebut antara lain :

a. Faktor keluarga yang tidak rukun

Faktor keluarga merupakan unsur terpenting dan berlaku umum pada hampir setiap kasus kejahatan terhadap asal usul perkawinan, sehingga faktor ini tidak terlalu terikat terhadap pelaku, waktu dan tempat tertentu. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa salah satu penyebab dari kejahatan yang dilakukan pelaku A, C, G dan I adalah karena ketidakharmonisan dan ketidakrukunan keadaan rumah tangga para pelaku. Sehingga para pelaku berselingkuh dan menikahi perempuan dan lelaki lain tanpa sepengetahuan para korban (istri atau suami pertama).

b. Faktor kekerasan

Sebab kedua adalah kekerasan, dimana para pelaku yang berjenis kelamin wanita melakukan kejahatan ini dikarenakan para suami mereka sering melakukan kekerasan fisik terhadap mereka. Dari hasil penelitian pelaku A (wawancara tanggal 29 Desember 2014) mengatakan bahwa, ia sering mendapatkan kekerasan fisik dari sang suami berupa pukulan, tamparan, tendangan serta sundutan rokok pada tubuh pelaku. Pelaku ingin menceraikan suami, namun suami tidak menginginkannya sehingga pelaku berselingkuh dan lari bersama selingkuhannya agar dapat terbebas dari suami dan melakukan kejahatan terhadap asal usul perkawinan yaitu melakukan perkawinan di kota palu secara sah dan tercatat di KUA.

Adapun menurut penulis, faktor kekerasan ini tidak dapat dijadikan alasan tersangka untuk melakukan kejahatan terhadap asal usul perkawinan ini. dikarenakan, tersangka seharusnya dapat menghindari kejahatan ini, dengan melakukan perceraian. Dimana, perceraian dapat dilakukan walaupun suami tidak menginginkan hal tersebut.

c. Faktor internal

Sebab ketiga adalah faktor internal, dimana para pelaku terlibat perasaan yang mendalam. Dimana, para pelaku tidak dapat bertindak secara benar atau membenarkan apa yang mereka lakukan.

Maksudnya adalah pola pikir para pelaku sudah bercampur dengan keadaan – keadaan yang tidak dapat mereka atasi, para pelaku sudah tidak dapat berfikir jernih atau para pelaku sudah tak memiliki jalan keluar lain sehingga dengan berat hati ataupun sukarela melakukan kejahatan ini. Para pelaku mengetahui bahwa apa yang mereka lakukan adalah salah, namun karena dorongan perasaan, rasa tanggungjawab, rasa kasihan maupun rasa sayang maka para pelaku melakukan kejahatan ini.

Selain itu, tingkat pengetahuan para pelaku yang masih rendah sehingga kejahatan ini dapat mudah terjadi. Seperti para pelaku dengan mudah dibujuk untuk menjadi selingkuhan dan lari bersama untuk menikah di kota lain.

Pelaku B (wawancara tanggal 29 Desember 2014) mengatakan bahwa ia melakukan kejahatan ini dikarenakan rasa sayang pelaku terhadap pelaku A sehingga dengan sukarela ikut lari keluar kota untuk hidup bersama. Selain itu pelaku B merasa kasihan dan tak tahan lagi dengan kelakuan suami pelaku A yang selalu melakukan kekerasan fisik terhadap pelaku A sehingga dengan tidak berfikir panjang melakukan kejahatan tersebut. Pelaku B juga mengatakan bahwa pelaku hanya seorang tamatan SMA sehingga tidak berfikir panjang tentang perbuatannya, dan merasa bahwa perbuatannya menjauhkan pelaku A dari sang suami adalah perbuatan yang benar walaupun

pelaku mengetahui bahwa perbuatannya melanggar norma – norma yang telah hidup dalam masyarakat.

Pelaku D (wawancara tanggal 1 Januari 2015) mengatakan bahwa ia telah menjalin kasih dari tahun 2010 dengan pelaku C dan pada tahun 2011 telah mengetahui bahwa pelaku C telah menikah dan memiliki dua orang anak, namun pelaku tidak memutuskan hubungannya dengan pelaku C karena pelaku terlanjur memiliki rasa sayang yang besar dan tetap menjalin hubungan, hingga pelaku akhirnya berbadan dua dan mendesak agar segera dinikahi sehingga tidak menimbulkan malu. Adapun pelaku D mengatakan bahwa pelaku merupakan guru honorer disuatu sekolah Dasar. Dilihat dari pendidikan, pelaku D merupakan seseorang yang terpelajar karena telah menamatkan studi diploma tiga jurusan keguruan, namun pelaku tidak dapat berfikir secara jernih dikarenakan telah dibutakan oleh rasa sayangnya kepada pelaku C.

Pelaku F (wawancara tanggal 30 Desember 2014), mengatakan bahwa pelaku awalnya tidak mengetahui status pernikahan pelaku E. Setelah menikah barulah pelaku diberitahu bahwa pelaku E bukanlah duda dan masih terikat tali perkawinan dengan istri pertama. Namun, walaupun telah diberitahu, pelaku tidak tahu harus berbuat apa, dikarenakan pelaku telah melakukan perkawinan secara sah dengan pelaku E dan tercatat di kantor KUA, sehingga pelaku hanya pasrah dan menerima untuk menjadi istri kedua pelaku. Menurut penulis,

pelaku F tidak seharusnya menjadi pelaku dalam kasus ini, dikarenakan pelaku F tidak mengetahui mengenai ikatan perkawinan sang suami (pelaku E), setelah menikah baru mengetahui sehingga pelaku F hanya dapat pasrah menjadi istri kedua.

Pelaku H (wawancara tanggal 5 Januari 2015), motifnya sama dengan pelaku D yaitu pelaku mengatakan bahwa pelaku telah menjalin kasih sebelumnya dan telah berbadan dua sehingga pelaku meminta pertanggungjawaban pelaku G. Perbedaannya adalah, pelaku H awalnya tidak ingin melakukan hubungan badan layaknya seorang suami istri dengan pelaku, namun karena terus didesak dan pelaku G meminta bukti cinta, dan bukti cinta yang diharapkan adalah melakukan hubungan layaknya suami istri, maka pelaku H dengan terpaksa melakukan hal tersebut dan mengakibatkan pelaku berbadan dua. Menurut penulis, pelaku H dengan mudah melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut beralasan cinta, karena pelaku H merupakan seorang lulusan SD dan bekerja sebagai penjaga warung sehingga pelaku dengan mudah terperdaya tanpa memikirkan masa depan dan konsekuensi dari apa yang dilakukan. Selain itu, pelaku juga merupakan seseorang yang memiliki iman yang lemah, dimana menurut pelaku H, dia tidak pernah diajarkan beribadah oleh keluarga walaupun di KTP pelaku beragama Islam.

Dari pernyataan keempat pelaku di atas dapat dilihat bahwa keadaan psikologis dan sosiologis para pelaku sangat berperan

penting dalam terjadi kejahatan terhadap asal usul perkawinan ini, dimana para pelaku yang memiliki perasaan yang tidak terkontrol yaitu rasa sayang yang berlebihan sehingga pelaku tidak dapat berpikir secara jernih dan rasional melainkan pelaku memiliki pikiran yang cenderung apatis dan melakukan hal – hal yang membuat dirinya maupun orang yang disayangi merasa bahagia, tanpa melihat konsekuensi yang dihasilkan dari perbuatan para pelaku. Selain itu, para pelaku juga memiliki strata pendidikan formal maupun pendidikan non formal yang kurang sehingga pelaku dapat dengan mudah dipengaruhi oleh keadaan lingkungan maupun kemauan para pelaku utama sehingga pelaku dengan mudah terjerumus dalam keadaan yang mengakibatkan pelaku harus melakukan kejahatan terhadap asal usul perkawinan ini.

d. Faktor pemahaman agama yang kurang

Sebab keempat adalah lemahnya iman. Para psikolog muslim telah membagi daya dan fakultas batin manusia dimana salah satu diantaranya disebut dengan ruhiyah. Secara etimologi, ruh atau ruhiyah berakar dari kata yang sama, yakni rawaha. Namun dalam kontekstual penggunaan keduanya memiliki makna yang berbeda. Ruh adalah nyawa sedangkan ruhiyah adalah sifat yang bersifat spirit, semangat dan belum tentu asalnya ruh atau nyawa.²⁷ Aspek fitrah

²⁷ Yadi purwanto, 2007. *Psikologi Kepribadian : integrasi nafsiyah dan aqliyah perspektif psikologi islam*. Bandung: Reflika Aditama, hlm 73

yang tertanam dalam jiwa manusia secara potensial akan tumbuh berkembang (mengaktual) sejalan dengan kesempurnaan akal dan kesucian pribadi individu. Semakin baik akhlak seseorang semakin tinggi pengetahuan seseorang, maka jiwa ruhiyah akan semakin kuat. Kebalikan dari itu adalah jiwa rendah yang menurut para psikologi muslim senantiasa mengajak manusia untuk memuaskan nafsu kebinatangannya (mirip dengan konsep “superego” dalam teori kriminologi Sigmund Freud)²⁸.

Menurut penulis salah satu sebab pelaku D dan pelaku H melakukan kejahatan asal usul perkawinan adalah lemahnya keimanan, atau dengan kata lain pemahaman agama yang dimiliki oleh para pelaku tersebut kurang. Seperti yang telah dijelaskan di atas, apabila kedua pelaku memiliki pemahaman agama yang baik, maka kejadian tersebut yaitu hamil di luar nikah tidak akan terjadi dan tidak akan membuat pelaku harus melakukan kejahatan tersebut. Penulis berkesimpulan seperti itu, dikarenakan kedua pelaku merupakan seseorang yang beragama Islam, dimana dalam pemahaman agama Islam, seorang muslim haram melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan pasangan yang belum menjadi muhrimnya atau belum menikah dengan sah.

²⁸ Fadli Ramadhani, 2013. *Skripsi: Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor yang Dilakukan oleh Oknum Mahasiswa di Wilayah Kota Makassar (Studi Kasus : 2009-2011)*. Makassar : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm 64.

e. Faktor jarak tempat tinggal

Sebab kelima adalah faktor jarak tempat tinggal. Dimana para pelaku memiliki tempat tinggal yang berbeda dengan pasangannya (suami atau istri) sehingga merasa kesepian dan memilih untuk berselingkuh.

Menurut pelaku E (Wawancara tanggal 3 Januari 2015), pelaku dan istri pertama tidak tinggal serumah karena pelaku bekerja di Kota Palu sedangkan istri menetap di Kota Palopo oleh karena pekerjaan, pelaku jarang pulang ke Palopo, bahkan sampai setahun tidak pulang. Oleh karena itu, pelaku mengatakan bahwa pelaku membutuhkan kehangatan perempuan sehingga memilih untuk berselingkuh dan mencari istri di tempat ia bekerja tanpa sepengetahuan istrinya. Adapun pelaku tidak menceraikan istri pertama karena memikirkan anak-anak yang dimiliki dan memilih untuk menikah secara diam-diam dan tinggal menetap di Kota Palu.

f. Faktor ketidakpahaman hukum

Sebab keenam adalah faktor ketidakpahaman hukum, maksudnya adalah salah satu sebab melakukan kejahatan terhadap asal-usul perkawinan adalah ketidakpahaman masyarakat terkhusus para pelaku mengenai kejahatan asal-usul perkawinan maupun uoaya

hukum yang berlaku atau ada di negara Indonesia. Dimana masyarakat tidak memahami bahwa apabila seseorang yang menikah untuk kedua kalinya tanpa putusnya perkawinan yang sebelumnya dan tanpa persetujuan pasangan yang pertama maka dapat didakwa melanggar pasal 279 KUHP. Masyarakat hanya memahami bahwa pelanggaran yang berkaitan dengan perkawinan hanya dapat diproses dalam pengadilan agama dan tidak menimbulkan sanksi penjara, padahal kejahatan terhadap asal usul perkawinan ini merupakan suatu kejahatan yang memiliki sanksi berat, seperti yang tertuang pada pasal 279 KUHP :

Selain itu, masyarakat juga tidak terlalu paham mengenai upaya – upaya hukum ada, sehingga mengabaikan proses hukum yang terjadi dan mengambil resiko untuk dijatuhkan sanksi.

Pelaku I (wawancara tanggal 10 Januari 2015) mengatakan bahwa, pelaku sesungguhnya tidak berniat untuk menikah tanpa sepengetahuan istri pertama dan mengaburkan asal usul pelaku menjadi duda, karena pelaku beranggapan bahwa dirinya telah menjadi duda, dan putusan cerai dari Pengadilan Agama Bulukumba telah berkekuatan tetap. Pelaku mengaku bahwa ia telah mengajukan cerai terhadap istri pertama ke Pengadilan Agama Bulukumba dan telah diputus secara Verstek oleh Pengadilan Agama Bulukumba. Putusan inilah yang dibawa pelaku sebagai bukti bahwa pelaku telah bercerai dan berstatus duda. Namun, ternyata istri pertama

mengajukan upaya hukum verset yaitu perlawanan terhadap putusan verstek yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba dan majelis hakim menerima upaya tersebut sehingga putusan verstek belum berkekuatan hukum (incraht). Surat pemberitahuan oleh pengadilan agama bahwa istri pelaku telah mengajukan upaya hukum verset telah pelaku terima, namun ia tidak memahami mengenai upaya hukum tersebut dan menyikapinya dengan santai dan menikah dengan saudara Rukmana sebelum proses upaya hukum yang diajukan istri pertama selsesai.

Dari penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa salah satu penyebab utama pelaku I melakukan kejahatan asal usul terhadap perkawinan ini adalah ketidakpahaman pelaku terhadap upaya hukum yang ada. Selain ketidakpahaman, kurangnya sosialisasi aparat penegak hukum terhadap masyarakat mengenai kejahatan terhadap asal usul perkawinan sehingga membuat masyarakat secara alami melakukan kejahatan ini tanpa mengetahui resiko yang akan mereka dapatkan.

B. Upaya – Upaya yang Dilakukan dalam Menanggulangi Kejahatan terhadap Asal Usul Perkawinan di Kota Palu

Adapun upaya – upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan terhadap asal usul perkawinan adalah :

1. Sosialisasi mengenai Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) oleh Pengadilan Negeri Palu

Upaya pertama yaitu sosialisasi mengenai Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) oleh Pengadilan Negeri Palu. Sosialisasi yang dimaksud adalah sosialisasi yang dilakukan atas oleh pengadilan negeri, dimana kegiatan ini dilakukan di kecamatan – kecamatan tertentu yang masyarakatnya dianggap kurang paham atau kurang mengetahui tentang hukum pada umumnya. Adapun dalam kegiatan ini, yang menjadi pemateri adalah hakim yang dianggap berkompeten untuk memberikan materi.

Menurut Nur Ibrahim hakim pada Pengadilan Negeri Palu (wawancara tanggal 6 Januari 2015) sosialisasi KADARKUM dilakukan tiga bulan sekali di suatu kecamatan yang masyarakatnya masih dianggap memiliki pengetahuan yang kurang mengetahui hukum. Adapaun sosialisasi ini dihadiri oleh setiap keluarga sehingga tujuan sosialisasi ini diterima dengan baik oleh setiap keluarga masyarakat. Tujuan dari sosialisasi ini adalah 1). Setiap masyarakat ataupun keluarga mengetahui mengenai hukum yang berlaku. 2). Masyarakat menjadi terhindar dari perbuatan yang melanggar hukum.

Dengan demikian upaya pertama ini merupakan salah satu upaya pencegahan kejahatan secara preventif, yaitu upaya yang bertujuan untuk mencegah masyarakat untuk melakukan suatu perbuatan melanggar hukum.

2. Penyuluhan mengenai kejahatan yang terjadi pada suatu perkawinan oleh aparat Kepolisian

Menurut Jusri Tandena (wawancara tanggal 29 Desember 2014) yang menjabat sebagai Kasat Perlindungan Perempuan dan Anak (KPPA) bahwa penyuluhan yang dilakukan oleh pihak kepolisian biasanya diadakan atas kerjasama dengan organisasi – organisasi kemahasiswaan baik yang organisasi intern maupun ekstrern mahasiswa. Adapaun penyuluhan yang dilakukan terkait dengan kejahatan dalam hal perkawinan biasanya bekerja sama dengan kantor BKKBN kota Palu.

Penyuluhan yang dilakukan kepolisian yang bekerja sama dengan kantor BKKBN berupa penyuluhan mengenai kejahatan yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan – perbuatan yang menyangkut pernikahan, status suami istri maupun yang tergabung ke dalam kejahatan dalam rumah tangga. Penyuluhan ini bertujuan agar masyarakat memahami mengenai kejahatan yang timbul dalam suatu perkawinan dan tidak melakukan perbuatan tersebut.

Upaya kedua ini, adalah upaya yang termasuk dalam upaya preventif yaitu bertujuan untuk mencegah masyarakat melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan melanggar norma - norma yang ada dalam masyarakat.

3. Membuat website yang dapat dengan mudah diakses oleh setiap Kantor Urusan Agama (KUA)

Upaya ketiga adalah membuat website yang dapat dengan mudah diakses oleh setiap Kantor Urusan Agama (KUA) di Indonesia. Maksudnya adalah kementerian agama sedang menjalankan program agar setiap KUA memasukkan data yang dimiliki ke dalam website yang disediakan dan dapat diakses oleh setiap KUA sehingga setiap orang yang mendaftarkan diri untuk menikah tidak dapat memberikan data palsu dan tidak dapat menikah untuk kedua kalinya dengan memberikan status belum menikah.

Menurut pegawai KUA MAF (Inisial) (Wawancara tanggal 9 Januari 2015) bahwa Kementerian Agama telah mengedarkan surat ke seluruh KUA agar setiap KUA wajib memiliki sarana internet untuk memudahkan pegawai menginput data ke dalam website pengolahan data informasi yang disediakan oleh Kementerian Agama.

Upaya tersebut menurut penulis merupakan upaya preventif yang diupayakan oleh kementerian agama agar setiap orang tidak dapat memalsukan data pribadi yang dilaporkan, sehingga kejahatan terhadap asal usul perkawinan tidak terjadi lagi.

4. Memproses secara Pidana Pasangan Pelaku Kejahatan terhadap Asal Usul Perkawinan

Upaya keempat yang dilakukan oleh aparat kepolisian adalah memproses secara pidana pasangan pelaku kejahatan terhadap asal usul perkawinan. Maksudnya adalah, apabila pelapor melaporkan seseorang melakukan perkawinan tanpa izin dari istri ataupun suami dari perkawinan sebelumnya, maka yang diproses atau didakwa bukan hanya yang dilaporkan melainkan yang dilaporkan dan pasangannya. Dengan kata lain kedua-duanya ikut dijadikan terdakwa dan diproses secara hukum.

Menurut aparat kepolisian Polres Kota Palu Jusri Tandena (wawancara tanggal 29 Desember 2014), bahwa upaya tersebut dilakukan agar kejahatan terhadap asal usul perkawinan tidak dilakukan dan membuat orang yang berpotensi melakukan batal melakukannya. Selain itu, upaya ini tidak serta merta diterapkan oleh kepolisian, dimana aparat kepolisian harus menyelidiki terlebih dahulu apakah pasangan pelaku mengetahui bahwa pelaku sudah memiliki istri maupun suami dan masih terikat secara sah dengan para korban. Apabila pasangan pelaku mengetahui dan tetap mengadakan perkawinan maka pasangan pelaku harus ikut menjadi terdakwa dalam kasus ini, karena ikut secara sadar melakukan kejahatan tersebut. Namun, apabila pelaku pasangan tidak mengetahui sama sekali sampai adanya laporan korban kepada pihak kepolisian, maka pelaku pasangan tidak dapat diproses secara pidana karena dianggap tidak

mengetahui dan melakukan kejahatan tersebut karena merasa tertipu oleh pengakuan pelaku.

Upaya ini termasuk tindakan represif, yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindak pidana. Upaya ini dilakukan sebagai salah satu cara agar kejahatan terhadap asal usul perkawinan dapat ditekan selain dan pelaku menjadi jera untuk mengulangi kejahatan tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Faktor – faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan terhadap asal usul perkawinan, adalah sebagai berikut :
 - a. Faktor Keluarga yang Tidak Rukun
 - b. Faktor Kekerasan
 - c. Faktor Internal
 - d. Faktor Pemahaman Agama yang Kurang
 - e. Faktor Jarak Tempat Tinggal
 - f. Faktor Ketidakpahaman Hukum
2. Upaya yang dilakukan aparat penegak hukum maupun Kementerian Agama dalam mencegah dan memberantas delik kejahatan terhadap asal usul perkawinan
 - a. Sosialisasi mengenai Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) oleh Pengadilan Negeri Palu
 - b. Penyuluhan mengenai Kejahatan yang Terjadi pada Suatu Perkawinan oleh Aparat Kepolisian
 - c. Membuat Website yang dapat dengan Mudah di Akses oleh setiap Kantor Urusan Agama (KUA)
 - d. Memproses secara Pidana Pasangan Pelaku Kejahatan terhadap Asal Usul Perkawinan

B. SARAN.

1. Masyarakat diharapkan dapat proaktif ikut dalam penanggulangan kejahatan seperti ini dengan tidak diam apabila mengetahui adanya pemalsuan identitas diri seseorang yang ingin mengadakan pernikahan sehingga pelaku tidak dapat mengecoh keluarga pasangan pelaku dengan mengaku menjadi sorang bujangan ataupun gadis.
2. Aparat penegak hukum kepolisian maupun pengadilan diharapkan dapat lebih gencar dalam melakukan sosialisasi dan penyuluhan terhadap masyarakat yang berada di daerah – daerah terpencil maupun di kota besar agar masyarakat mengetahui jenis kejahatan terhadap asal usul perkawinan, dan tidak lagi melakukan kejahatan ini dengan dalih tidak mengetahui mengenai adanya jenis kejahatan ini.
3. Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) diharapkan dapat lebih teliti dalam memeriksa data – data pribadi para calon mempelai (perempuan maupun laki – laki) sehingga pemalsuan dapat dihindari dan kejahatan terhadap asal usul perkawinan tidak terjadi dengan mudah.

DAFTAR PUSTAKA

- A. S. Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar : Pustaka Refleksi.
- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Rofiq. 2013. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Arif Gosita. 2009. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta : Universitas Trisakti.
- Barda Nawawi Arif. 2008. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta : Kencana.
- Masruchin Ruba'i. 2001. *Asas – Asas Hukum Pidana*. Malang : UM Press.
- Soedjono Dirjosisworo. 1994. *Sinopsis Kriminologi Indonesia*. Bandung : Mandar Maju.
- Sudarsono. 1991. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Sudarsono. 2010. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa. 2011. *Kriminologi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Yadi Purwanto. 2007. *Psikologi Kepribadian : Integrasi Nafdiyah dan Aqliyah Perspektif Psikologi Islam.*, Bandung ; Reflika Aditama
- Yesmil Anwar & Adang. 2013. *Kriminologi*. Bandung : Refika Aditama